

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Cahyadi, Irwandi. “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Di Indonesia” malang (2014): hal 6-10.
- Agustin Sukses Dakhi. “Perkawinan Beda Agama (Suatu Tinjauan Sosiologi).” *Jurnal Education and Development Institut Tapanuli Selatan* Vol 7 No 3 (2019).
- Ahmad Rifai, Ibnu Shodiq. “Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan Dari Masyarakat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974.” *Universitas Negeri Semarang*, 1, vol.4 (2015): 5.
- Akunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Ali, Afandi. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Dan Hukum Pembuktian*. PT Rineka Cipta, 2004.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba 'ah*. Jilid 4. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2014.
- Al-Syafi'i, Muhammad Idris. *Al-Umm*. Jilid 5. Beirut: Dar al-Fikr, 2009.
- Amak, F.Z. *Proses Undang-Undang Perkawinan*. Bandung: PT. Al Ma'arif, 1976.
- Amir Nuruddin, Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Andika Raihan and Jailani Elan. “Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Dalam Hukum Positif Indonesia.” *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* No. 04 (2023): hal 12.
- Anshary, M.K. *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Asshsiddiqie Jimly. “Perihal Undang-Undang,” 393. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Baso Ahmad. “Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen, Keagamaan, Dan Analisis Kebijakan,” 1st ed. Jakarta: Imparsial, 2005.
- “BEDAH STAATSBLAD” DI MUSEUM BPK RI,” 2020.
<https://museum.bpk.go.id/?p=1277>

- Buana, Andika Prawira. “Konsistensi Dan Pengaruh Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Praktek Perkawinan Beda Agama Di Makassar.” *HAM* 8, no. 2 (2017)
- Cahyadi, Irwandi. “Perlindungan Hukum Dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.” *MALANG*, 2013, 47.
- Cindy Silvy Foresty and Khoirul Hadi al-Asyari. “Problem Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia: Studi UU No1 Tahun1974 Serta UU No 39 Tahun 1999 Dan Hukum Islam.” *Yudisia* vol 7 no 1 (June 2016): 43.
- Crisdi Gonadi, Aurora Vania, and Gunawan Djajaputra. “Analisis Prespektif Pro Kontra Masyarakat Terhadap Penerapan Sema No.2 Tahun 2023.” *UNES law review* 6 (September 2023): 7.
- Daus, Candra Refan, and Ismail Marzuki. “Perkawinan Beda Agama Di Indoensia: Perspektif Yuridis, Agama-Agama Dan Hak Asasi Manusia.” *Al-`Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 8 (2023).
- . “Perkawinan Beda Agama Di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-Agama Dan Hak Asasi Manusia.” *Al-`Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (June 28, 2023).
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Encik Muhammad Fauzan. “Dasar-Dasar Perundang-Undangan Di Indonesia,” hal 63. Malang: Setara press, 2020.
- eneng, juandini, and Muksalmina. “Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia.” *Jurnal Inovasi Penelitian* Vol 02, no. 06 (2021).
- faiq, Moh. “Kepastian Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022.” *SAKINA : JOURNAL OF FAMILY STUDIES* Vol 7, no. 3 (2023): 420–35.
- Faiz shobir alfikri ahmad. “Determinasi Sema Nomor 2 Tahun 2023 Dalam Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Prespektif Asas Kepastian Hukum.” Malang, n.d.

- Farida Maria. "Ilmu Perundang-Undangan," hal 157. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Fernando Situmorang and Ramlani Lina. "Kajian Hukum Tentang Kedudukan SEMA No. 2 Tahun 2022 Atas Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004." *Jurnal Studi Interdisipliner Prespektif* vol 2 (2022).
- Ghafur, Fauzan, Fazari Zul Hasmi Kanggas, and Setiawan Bin Lahuri. "Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Universitas Darussalam Gontor* volume 3 (2020): 226.
- Gustav Radbruch. "Legal Philosophy," So Woong Kim., hal 130. Seoul, 2022.
- Hasan, Djubaidah. *Hukum Keluarga Setelah Berlaku UU No.1 Tahun 1974 (Menuju Ke Hukum Keluarga Nasional)*. Bandung: Armico, 1988.
- HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ispryiarso Budi. "Asas Keadilan Dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing." *Refleksi Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 3 No. 1 (2019): hal 70.
- jaziri, Abdurrahman al. "Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'Ah," Dar al Fikr t.th., 3. Juz IV. Beirut, n.d.
- Jeane Neltje and Indrawieny Panjiyoga. "Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum." *Innovative: Journal of Social Science Research* Vol 3 No 5 (2023).
- Juandini, Eneng. "Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia Terhadap Perkawinan Beda Agama." *Journal on Education* 5, no. 4 (2023).
- Karsayuda, Karsayuda. "Perkawinan Beda Agama," Total Media Yogyakarta. Yogyakarta, 2006.
- Khamim. "Harmonisasi Norma Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Undang -Undang Administrasi Kependudukan." Skripsi, UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, 2017.
- Kharisma and Auliya Bintang. "Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?" *Journal of Scientech Research and Development* vol 5 (2023).
- Komnas Ham. "Universal Declaration of Human Rights 1948," 1948.
- M. Karsayuda. "Perkawinan Beda Agama (Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam)," hal 3. Yogyakarta: Total Media, 2006.

- Mappantunru andi Munafri. "The Pure Theory of Law & Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Hukum Indonesia." *Indonesia Journal of Criminal Law* Vol 2 No 2 (2020): hal 150.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revi. Jakarta: Kencana, 2019.
- . *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2018.
- maulida, Kamila. "Politik Hukum Undang-Undang Perkawinan Indonesia." *Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah* 3, no. 2 (2022): 208.
- Meliala, Djaja. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung. Nuansa Aulia, 2012.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Musyaffa Amin Ash Shabah. "Perkawinan Sebagai Ham." *MASLAHAH* Vol.11 No.2 (Desember 2020): 31–32.
- Niketut Tri Srilaksmi. "Fungsi Kebijakan Dalam Negara Hukum." *Jurnal Pariksa* vol 6 (2020): hal 30.
- Nurfaqih, irfani. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Pesterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 17, no. no 3 (2020).
- O.S Eoh. "Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek," Cet.ke 1., hal 7. Jakarta: Raja Gafindo Persada, 1996.
- P. Sibuea, Hotman. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Palsari Cahya. "Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan." *Jurnal Komunitas Yustisia* Vol 4 No.3 (2021): 47.
- Pamungkas, Eduardus Krisna, and R F Bhanu Viktorahadi. "Perkawinan Beda Agama Menurut Kitab Suci, Ajaran, Dan Hukum Gereja." *Religious*, no. 3 (2021).
- Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Administrasi Pemerintahan*, n.d.
- "Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," n.d.
- "Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," n.d.

- “Pasal 8 Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan J.Uncto Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung,” n.d.
- “Pasal 12 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan Dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia,” n.d.
- “Pasal 16 Ayat (1), (2), Dan (3) Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia,” Vol. Vol 4 No 1. International Law Making, 2006.
- “Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung,” n.d.
- “Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung,” n.d.
- “Penjelasan Pasal 5 Huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” n.d.
- Philipus, M. Hadjon. “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,” hal 152. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta. Sumur Bandung, 1981.
- Purwanto Yedi. “Kawin Beda Agama Dan Perlindungan HAM.” *Jurnal Asy-Syari’ah* Vol.16,No.3 (Desember 2020): hal 2.
- “Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986,” 1986.
- “Putusan Mahkamah Konstitusi No.46 PUU-VIII/2010,” hal 27, 2010.
- Qodhi, Imam al-. “Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid.” Beirut, 2008.
- Rahmadi, Usman. “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia.” *Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin*, No. 03, vol 14, no. Pencatatan Perkawinan (2017).
- Rahmwati and Ni Nyoman. “Pengesahan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Hindu.” *Ejournal Unsrat* Vol 9 No 1 (2019).
- Republik Indonesia. “Pasal 10 Dan 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,” n.d.
- . “Pasal 28B Dan 28E Undang-Undang Dasar 1945,” n.d.

- . “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Tahun 1974 No.1, Tambahan Lembaran Negara No. 3019,” n.d.
- Ridho, Muhammad, Muhammad Amin Qodri, and Ageng Triganda Sayuti. “Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung.” *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law* 4, no. 1 (2023).
- Riqval, Fadzil Julian. “Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Menurut Hukum Islam Dalam Pandangan Empat Madzhab.” *Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 4, no. 1 (2023).
- Rosdiana and Ummu Hannah Yusuf Saumin. “Legitimacy on Interfaith Mariages: An Analysis of The Rule of Religious Councils on The Legal Policy in Indonesia.” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, n.d.
- sari, Rahma Nurlinda. “Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Ham.” universitas islam negri raden intan lampung, 2018.
- Setiabud, Lysa. “Analisis Perkawinan Beda Agama Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Izin Perkawinan Beda Agama.” UNNES, 2016.
- Setiabudi, Lysa. “Analisis Perkawinan Beda Agama Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Izin Perkawinan Beda Agama,” Semarang., 8. UNNES, 2016.
- Shodiq, Jafar, Misno Misno, and Abdul Rosyid. “Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 7, no. 01 (September 1, 2019).
- “Siaran Pers Komnas Perempuan Perempuan Merespon Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan,” 2023.
- Siti Halilah and Fakhrurrohman Arif. “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli.” *Siyasah* No. 2 (2021): 60.
- Slamet Suhartono. “Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya.” *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* Vol 15 No 2 (2020).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sulistiyawan, Julyano. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum.” *Jurnal Crepido* 01 (2019).

- “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan,” 2023.
- Suryabarata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Suwondo, Nani. *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Dan Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.
- Syahuri, Taufiqurrahman. *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta. Kencana, 2013.
- Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi. “Fikih Empat Madzhab.” Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021.
- Syamsiyah, Marlina. *Izin Perkawinan Beda Agama Atas Penetapan Hakim Perspektif Kepastian Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2023.
- Taufiqurrahman. *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Titik Triwulan Tutik. “Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia,” hal 106. Jakarta: Presentasi Pustaka, 2006.
- Tony Proyogo R. “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang.” *Jurnal Legislasi Indonesia* No.2 (2016): hal 194.
- Trusto, Subekti. “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian.” *Jurnal Dinamika Hukum* vol 10 (2010): 338.
- Ubed Bagus Razali, S.H.I., S.H. “Mengakhiri Polemik Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dan Keyakinan.” Koran Bhirawa, 2023.
- “Undang-Undang Dasar R.I 1945,” Surakarta. Pustaka Mandiri, 1945.
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 1974.
- Usman, Rachmadi. “Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia,” *jurnal legislasi indonesia*, 14 (2017).

- Vestwansan Dipa prastya. "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Online Mahasiswa Universitas Riau* No.1 (2020): hal 14.
- Wahbah, Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*. Jilid 7. Beirut: Dar al-Fikr, 2020.
- Yani, Pande Putu Gita, I Ketut Sukadana, and Luh Putu Suryani. "Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dalam Masyarakat Hindu Di Bali." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (March 19, 2021).
- Yasmine, Bouzora. "Between Substance and Autonomy: Finding Legal Certainty in Google Shopping." *Journal of European Competition Law & Practice*, 13 (2022): 145.
- Yohen, Samantha Maria. "Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Beda Agama Di Indonesia." *Veritas*, no. 1 (2023).
- Yunus, Fakhurrazi M., and Zahratul Aini. "Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam)." *Media Syari'ah* 20, no. 2 (2020).
- Yusup, Deni. *Kodifikasi UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, 2012. <http://dkyusup.blogspot.com/2008/04/kodifikasi-uu-no39-tahun-1999.html>.
- Zainuddin Ali. "Sosiologi Hukum," hal 14. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Zuhdi, Muhdhor. *Kamus Kontemporer (al-Ashri) Arab-Indonesia*. Yogyakarta. multi aya grafika, 2003.
- Zulfadhli, Zulfadhli, and Muksalmina Muksalmina. "Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." *JIP: Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 6 (2021).

